

KEARIFAN LOKAL DALAM PEMANFAATAN DAN PELESTARIAN SUMBERDAYA PESISIR (Studi Kasus di Desa Panglima Raja Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau)

Zulkarnain, Asdi Agustar, Rudi Febriamansyah

Abstract: A case study on local wisdoms of coastal zone resource use and conservation was conducted in Panglima Raja Village, Concong Subdistrict Indragiri Hilir Regency of Riau Province in 2006-2007. It was found that the local wisdoms for resource use consist of (i) determining the proper time, weather, and season of fishing; (ii) making traditional fishing gear to catch and collect shell; (iii) decision of the cutting zone of mangrove. The local wisdoms for resource conservation are (i) ceremony to honor the sea (ii) commitment not to catch and kill the dolphin (iii) believe there are the secret zone (iv) commitment not to throw rubbish into the sea (v) commitment not to use of songko machine in collecting the shell (vi) guardian of the mangroves. The role of customary institutions has been decreasing, predicted even since long time ago, as the national government in the independent era is only forwarding the former system and ways of coastal zone resource use and conservation.

Kata Kunci: *Kearifan lokal, sumberdaya wilayah pesisir, institusi lokal*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Wilayah pesisir dan lautan merupakan potensi ekonomi Indonesia yang perlu dikembangkan. Hal ini disebabkan wilayah pesisir dan laut merupakan 63% dari wilayah teritorial Indonesia. Didalamnya terkandung kekayaan sumberdaya alam dan jasa lingkungan yang sangat kaya dan beragam, seperti perikanan, terumbu karang, hutan mangrove, minyak dan gas, bahan tambang dan mineral, dan kawasan pariwisata (Dahuri, 2001).

Pemanfaatan sumberdaya pesisir sering kali dilakukan tanpa melihat pelestarian dan keseimbangannya, dieksploitasi secara sesuka hati demi kepuasan dan keuntungan pribadi. Hal inilah yang menyebabkan sumberdaya pesisir

dalam keadaan terancam dan memungkinkan berbagai potensi yang dimilikinya terdegradasi dan segala bentuk kekayaan yang terkandung di dalamnya musnah. Oleh sebab itu, segala bentuk upaya yang mengganggu keutuhan dan kelestarian fungsi wilayah pesisir dan laut perlu diminimalkan agar potensinya yang berlimpah dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan, sebagai tumpuan harapan masa depan anak cucu generasi penerus bangsa terutama dalam menghadapi berbagai tantangan global menuju pembangunan yang lebih maju.

Perilaku masyarakat sebagai sebuah kearifan lokal dalam pelestarian lingkungan diproyeksikan dengan cara cara yang sesuai dengan pola pikir dan tradisi setempat, diharapkan mampu memunculkan konsep dan cara menja-

*Zulkarnain adalah Mahasiswa Pascasarjana Universitas Andalas
Asdi Agustar, Rudi Febriamansyah adalah Dosen Pascasarjana Universitas Andalas*

ga keseimbangan pelestarian lingkungan. Berbagai macam bantuk pantangan, larangan, tabu, pepatah-petitih dan berbagai tradisi lainnya dapat mengungkapkan beberapa pesan yang memiliki makna sangat besar bagi pelestarian lingkungan khususnya sumberdaya pesisir.

Prijono (2000) menyatakan bahwa di Indonesia masih terdapat berbagai bentuk kearifan lokal dari kelompok masyarakat adat yang mempraktekan cara tradisional untuk mengelola sumberdaya pesisir. Sebagai contoh pada masyarakat adat di pesisir Pulau Saparua Maluku yang memiliki cara memelihara kawasan pesisir dengan konsep petuanan *Sasi* yang mengatur tentang hal konservasi sumberdaya tertentu agar dapat memberikan manfaat dan keuntungan secara berkelanjutan. Akan tetapi sejalan dengan proses dinamika kehidupan masyarakat, kearifan lokal terdegradasi dengan nilai-nilai dan norma adat yang memudar, karena perkembangan dan tantangan kehidupan yang semakin kompleks. Sejumlah substansi kearifan lokal yang pernah dianut dalam masyarakat tidak lagi menjadi pedoman berperilaku. Kearifan lokal dalam pelestarian wilayah pesisir misalnya untuk menjaga dan mengatur sistem penangkapan ramah lingkungan, saat ini sudah menghilang dan digantikan dengan sistem eksploitasi berlebihan.

Upaya untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap kekuatan kearifan lokal untuk pelestarian sumberdaya pesisir perlu dilakukan, yaitu dengan memperhatikan beberapa hal berikut: (i) pengembangan kelembagaan masyarakat lokal dan (ii) peningkatan apresiasi budaya lokal, seperti pantangan dan larangan, petatah-petitih dan peribahasa adat. Upaya tersebut dapat disertai dengan menggali pesan-pesan ke-

arifan atau substansi kearifan, yang selanjutnya disesuaikan dengan landasan pemahaman masyarakat saat ini.

Salah satu daerah yang memiliki kekayaan potensi sumberdaya pesisir adalah Desa Panglima Raja, yang terletak di Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir. Kawasan ini memiliki potensi wilayah pesisir yang cukup baik dibandingkan beberapa daerah lainnya. Masyarakat di kawasan ini sangat tergantung dengan wilayah pesisir yang dijadikan sebagai tempat memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka. Aktifitas mencari kerang dan menangkap ikan merupakan aktifitas pokok yang tidak pernah lepas dari keseharian mereka.

Sebagai pusat berbagai kegiatan pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat, kawasan pesisir ini perlu mendapat perhatian tentang pelestariannya. Pada saat ini kegiatan pelestarian di kawasan ini belum menjadi hal yang utama walaupun pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir telah menjadikan daerah ini sebagai kawasan pengelolaan sumberdaya pesisir (*Marine and Coastal Resources Management*) sejak tahun 2002.

Banyak sekali kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam menjaga kelestarian lautnya tidak menjadi bagian dalam pengelolaan sumberdaya pesisir yang direncanakan atau dilakukan oleh pemerintah. Kebiasaan (*folkways*) masyarakat dalam menjaga dan mengelola sumberdaya pesisir hanya menjadi kekuatan yang mengikat untuk komunitas itu sendiri. Kearifan masyarakat dalam interaksinya dengan alam hanya menjadi kekuatan adat dalam bentuk kebiasaan yang hanya mengatur pada tataran komunitas lokal mereka saja.

Karena sifat hukum adat pada umumnya tidak tertulis, hanya sebagai kebiasaan perilaku masyarakat lokal, ba-

nyak sekali kearifan lokal masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya pesisir tidak atau belum diketahui banyak orang, terutama dalam konteks ilmiah. Bahkan boleh jadi kearifan lokal yang dahulu pernah ada, sudah mulai menghilang atau tidak dijalankan lagi oleh masyarakat karena pergeseran dan berbagai perubahan sistem nilai sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang terjadi begitu cepat.

Pengidentifikasian kearifan lokal masyarakat perlu dilakukan karena belum ada kajian tentang hal ini terutama di daerah-daerah yang memiliki rentabilitas kerusakan lingkungan yang besar dan rentang kendali yang rumit oleh karakteristik wilayah yang berpulau-pulau. Pendesainan pengelolaan sumberdaya pesisir pada tataran masyarakat desa sangat membutuhkan penyerapan nilai-nilai budaya yang sudah mengakar dalam kehidupan mereka. Nilai-nilai budaya tersebut terutama yang berkaitan dengan kearifan masyarakat dalam berinteraksi dengan lingkungan ekologisnya, baik yang pernah dijalankan, yang sedang dijalankan, atau menyerap kearifan lokal masyarakat lain yang cocok dengan karakteristik masyarakat setempat.

Perumusan Masalah

Pengidentifikasian kearifan lokal nelayan seharusnya lebih difokuskan pada permasalahan dalam sistem mata pencaharian masyarakat yang mempunyai pengaruh pada keberlangsungan hidup mereka. Penyelamatan sumberdaya pesisir merupakan salah satu isu lingkungan penting dalam tataran masyarakat internasional karena memiliki korelasi yang signifikan dengan sumber mata pencaharian masyarakat setempat.

Pengkajian kearifan lokal masyarakat dalam pelestarian sumberdaya pesisir di daerah yang memiliki banyak po-

tensi sumberdaya perikanan seperti pada kawasan Desa Panglima Raja di Kabupaten Indragiri Hilir menjadi semakin penting sebagai bagian dari usaha penyelamatan wilayah pesisir yang merupakan tempat beraktifitas para nelayan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Kearifan lokal apa saja yang pernah dijalankan dan masih berlangsung dalam kehidupan masyarakat di Desa Panglima Raja dalam pemanfaatan dan pelestarian sumberdaya pesisir?
2. Bagaimana peran kelembagaan lokal yang berkaitan dengan kearifan lokal dalam pemanfaatan dan pelestarian sumberdaya pesisir tersebut?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengidentifikasi kearifan lokal dalam pemanfaatan dan pelestarian sumberdaya pesisir yang pernah dijalankan dan masih berlangsung dalam kehidupan masyarakat di Desa Panglima Raja
2. Mengidentifikasi dan menganalisis peran kelembagaan lokal yang berkaitan dengan kearifan lokal tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini telah dilaksanakan di Desa Panglima Raja Kecamatan Congcong Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau pada bulan Desember 2006 sampai dengan akhir Januari 2007.

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan pendekatan kualitatif, menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dan perilaku dari orang-orang ataupun masyarakat pada wilayah penelitian (lihat Bogdan dan Taylor atau Kirk dan Miller dalam Maleong, 2000).

Data sekunder berupa dokumen, literatur, dan publikasi dikumpulkan dari instansi pemerintah dan non-pemerintah. Data primer dikumpulkan dari informan yang terdiri dari masyarakat nelayan, tokoh masyarakat, dan aparat Desa Panglima Raja dengan pendekatan wawancara mendalam dan observasi. Secara operasional data yang dikumpulkan adalah:

1. Kearifan lokal dalam kegiatan pemanfaatan dan pelestarian sumberdaya pesisir yang dilakukan oleh masyarakat.
2. Peran kelembagaan lokal, berupa peran lembaga adat dan lembaga pemerintahan desa terhadap kearifan lokal sehingga menjadi nilai, norma dan prinsip yang dianut masyarakat

Informan penelitian dipilih secara purposive dengan menggunakan teknik *snowball sampling*, dimana subjek (*sample*) yang dipilih paling awal menunjuk rekan lain yang diperkirakan bisa memberikan informasi lebih dalam dan rinci (Sugiyono 2000). Jumlah informan terpilih adalah 15 orang yang berasal dari Lembaga Adat dan Lembaga Pemerintahan Desa yang terdiri dari sepeuh adat (tetua adat), Kepala Desa, Ketua Badan Perwakilan Desa, Ketua RT, Ketua RW dan para aparat organisasi kepemudaan dan tokoh-tokoh masyarakat Desa Panglima Raja.

Berdasarkan panduan yang disusun oleh Maleong (2000), analisis data disusun menjadi: (1) telaahan data dan informasi dari berbagai sumber hasil wawancara, observasi dan dokumen; (2) reduksi data informasi dengan membuat abstraksi sebagai rangkuman inti dari semua pernyataan sehingga tetap ada; (3) susunan data dan informasi dalam satuan-satuan; (4) kategorisasi data dan

informasi; (5) hasil pengecekan keabsahan data dan informasi, dengan cara mengkonfirmasi-kembali setiap data dan informasi yang diperoleh. Adapun analisis data yang digunakan adalah berupa analisis kualitatif (studi kasus).

Untuk kemudahan, penelitian ini menetapkan definisi-definisi operasional sebagai berikut:

1. Kearifan lokal adalah berupa prinsip-prinsip dan cara tertentu yang dianut, dipahami, dan diaplikasikan oleh masyarakat lokal dalam berinteraksi dan berinterelasi dengan lingkungannya dan diformulasikan dalam bentuk sistem nilai dan norma adat
2. Pelestarian lingkungan adalah konsep *inter-relationship* dengan lingkungan sekitar, dengan prinsip memanfaatkan sekaligus memelihara keberlanjutan lingkungan
3. Masyarakat lokal adalah sekelompok besar maupun sekelompok kecil manusia yang hidup dalam suatu kawasan tertentu, sedemikian lama bahkan sudah banyak, mempunyai keturunan, memiliki aturan-aturan dan sanksi yang mereka buat sendiri, dan dapat memenuhi kepentingan hidup yang utama
4. Adat istiadat berisikan nilai-nilai, filosofi hidup dan hukum-hukum yang harus dipatuhi oleh masyarakat lokal
5. Lembaga adat merupakan organisasi sosial yang dibentuk masyarakat hukum adat bersangkutan, mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak, berwenang mengatur, mengurus dan menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan adat

6. Sistem nilai adalah patokan, ukuran, anggapan dan keyakinan tentang sesuatu yang dianggap benar, luhur dan baik yang harus dilakukan dan diperhatikan masyarakat
7. Norma adalah aturan-aturan yang disertai sanksi tertentu yang digunakan untuk memberikan dorongan seseorang atau sekelompok orang untuk mencapai nilai-nilai yang dianut
8. Peran kelembagaan lokal adalah keterlibatan kelembagaan lokal terhadap kegiatan kearifan masyarakat lokal dalam pemanfaatan dan pelestarian sumberdaya pesisir.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keadaan Umum Desa Panglima Raja

Kondisi Geografis

Desa Panglima Raja terletak di Pulau Concong, bagian kawasan pulau-pulau yang berada di pesisir Timur Sumatera. Secara Administratif, Desa Panglima Raja adalah salah satu dari 13 desa yang terletak di Kecamatan Kuala Indragiri Kabupaten Indragiri Hilir, berjarak sekitar 61 km dari ibu kota Kabupaten Indragiri Hilir, Tembilahan. Dari Tembilahan menuju ke Desa Panglima Raja hanya dapat ditempuh melalui transportasi air dengan menggunakan perahu motor atau *speed boat* menyusuri Sungai Indragiri ke arah Timur. Secara geografis posisi Desa Panglima Raja terletak pada 00°14'09"- 00°21'31" LS dan 103°38'42"-103°47'53" BT, yang wilayahnya berbatasan dengan Selat Berhala di sebelah Utara dan Timur, desa Sungai Bela di sebelah Selatan, dan desa Concong Luar di sebelah Barat.

Jumlah Penduduk dan Keadaan Pemukiman.

Menurut data monografi desa tahun 2006, jumlah penduduk Desa Panglima Raja sampai bulan No-pember 2006 tercatat 2.651 jiwa yang terdiri dari 1351 laki-laki dan 1300 perempuan yang berasal dari 520 KK. Klasifikasi penduduk ini menurut umur adalah: 0-1 tahun berjumlah 213 jiwa (8,03%), 6-15 tahun berjumlah 387 jiwa (14,60%), 16-25 tahun berjumlah 738 jiwa (27,84%), 26-55 tahun berjumlah 975 jiwa (36,78%), dan diatas 55 tahun berjumlah 338 jiwa (12,75%).

Penduduk desa ini didominasi oleh etnik suku laut yang dikenal dengan etnis suku Duano (berkisar 95%) dan selebihnya adalah suku Bugis, Jawa, Cina, Banjar, Minang, dan Melayu (5%). Bahasa yang digunakan sesama penduduk desa adalah bahasa Melayu. Rumah yang dihuni oleh masyarakat di wilayah ini pada umumnya rumah panggung semi permanen yang terletak di tepi pantai atau sepanjang kawasan pesisir. Jarak rumah yang satu dengan yang lainnya berdekatan, padat, sehingga tidak menyisakan ruang terbuka untuk fasilitas umum. Jalan penghubung pada pemukiman berupa jalan-jalan panggung seperti dermaga yang terbuat dari kayu dan dibangun dengan beberapa tonggak kayu yang mereka sebut "*jalan pelantar*".

Pola pemukiman demikian sangat terkait dengan pola kegiatan ekonomi yang umumnya mempunyai mata pencaharian sebagai nelayan.

Mata Pencaharian Penduduk.

Secara garis besar mata pencaharian penduduk Desa Panglima Raja dapat terlihat pada Tabel.1 berikut ini.

Tabel 1. Mata Pencaharian Penduduk Desa Panglima Raja

Mata Pencaharian	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
Petani	235	11,66
Usaha Nelayan	135	6,70
PNS	4	0,20
Pedagang	43	2,13
Nelayan Buruh	1598	79,31
Jumlah	2015	100

Sumber: Monografi Desa 2006

Karakteristik Sosial Budaya

Keadaan masyarakat Desa Panglima Raja tidak terlepas dari keberadaan suku Laut atau suku Duano. Suku Laut terkenal sebagai representasi masyarakat bahari, yakni masyarakat yang memiliki jiwa dan tradisi yang menjadikan laut sebagai basis terbentuknya kebudayaan. Hal ini disebabkan Suku Laut dulunya hidup berkelana menangkap ikan dengan sampan (*berkajang*) yang ternyata juga sekaligus berfungsi sebagai rumah. Semua aktivitas keseharian kehidupan dilakukan di atas sampan tersebut. Namun demikian, saat ini sulit ditemukan pola hidup Suku Laut yang demikian. Mereka sudah hidup menetap di sepanjang wilayah pesisir.

Penduduk suku laut (suku Duano) merupakan keturunan dari campuran dua ras besar *Veddoid* dan *Mongoloid* (Proto-Melayu). Percampuran tersebut terlihat dari ciri-ciri fisik orang suku Laut yang tidak terlalu tinggi, berpostur tubuh atletis, bidang dada lebar, dan ukuran tulang pinggul sampai ke kaki panjang. Raut muka suku Laut bersegi dengan tulang rahang yang lebar. Warna kulit suku laut cenderung hitam dan rambut ikal berwarna hitam. Karakteristik temperamental psikologi sifat suku Laut adalah cepat tersinggung dan marah, namun mereka termasuk orang yang mudah beradaptasi, mandiri dan mobilitas tinggi yang mencirikan "etos

kepesisiran" (Badan Penelitian Pengembangan dan Pemanfaatan Sumberdaya Perairan, 2004)

Kehidupan masyarakat suku Duano sangat tergantung dengan wilayah pesisir, laut menjadi bagian utama yang tak terpisahkan dalam sistem kehidupan masyarakat suku Duano. Mereka memanfaatkan laut sebagai tempat tinggal dan sumber mata pencaharian utama dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dapat dikatakan bahwa masyarakat suku Duano tidak dapat melakukan kegiatan sehari-harinya tanpa aktifitas melaut. Menangkap ikan dan mencari kerang di kawasan pesisir panglima raja merupakan bagian aktifitas kehidupan yang mengisi kesibukan masyarakat suku Duano. Disamping itu kondisi sosial budaya masyarakat desa ini juga telah berakumulasi dengan sosial budaya masyarakat pendatang yang terdiri dari suku-suku lain yang menetap di daerah daratan Desa Panglima Raja seperti, Cina, Banjar, Bugis, Jawa dan Minang. Sebahagian besar masyarakat Desa Panglima Raja memeluk agama Islam, sehingga orientasi budaya yang dijalankan berakar pada budaya Islam. Ritual dan esensi agama Islam tercermin dalam kehidupan sehari-hari seperti pengajian yasinan dan kegiatan hajatan.

Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat masih menjunjung semangat kebersamaan dan gotong royong. Ben-

tuk-bentuk kegiatan bersama yang sering dilakukan adalah dalam bentuk kegiatan bakti bersih lingkungan (dilakukan setiap hari Jumat), kegiatan perkawinan, perayaan hari besar nasional, kematian dan lain-lain. Dalam kegiatan-kegiatan adat biasanya yang dipakai adalah adat Melayu.

Masyarakat di Desa Panglima Raja masih menghormati dan menjadikan tokoh-tokoh masyarakatnya sebagai panutannya. Tokoh-tokoh masyarakat di desa ini yang paling berperan dan dihormati adalah tokoh masyarakat, kemudian diikuti oleh kepala desa, tokoh pendidikan dan tokoh agama. Tokoh pemuda, pengusaha ikan, dan pemuka nelayan tergo-

long kedalam kelompok tokoh masyarakat. Pada setiap aktivitas pembangunan yang dilakukan masyarakat di wilayah ini, diperlukan pendekatan melalui tokoh masyarakat dan kepala desa, selain tokoh agama dan tokoh pendidikan merupakan cara yang cukup efektif untuk mencapai keberhasilan berbagai program yang dijalankan.

Kegiatan Sosial Masyarakat

Kegiatan-kegiatan sosial masyarakat Desa Panglima Raja sangat berkaitan erat dengan kegiatan keagamaan seperti pengajian, wirid dan kegiatan-kegiatan yang telah diprogramkan oleh pemerintah desa.

Tabel 2. Kegiatan-kegiatan Sosial Masyarakat Desa Panglima Raja

No.	Jenis Kegiatan	Dusun Panglima Raja	Dusun Sungai Condong
1.	Wirid Pengajian Kaum Ibu	√	-
2.	Wirid Pengajian Kaum Bapak	√	-
3.	Pengajian salawat untuk anak-anak	√	√
4.	Wirid pembacaan yasin	√	√
5.	Arisan	√	-
6.	Pengajian Tolak Balak	√	-
7.	Peringatan Hari Besar Islam	√	√
8.	Perayaan Hari Besar Nasional	√	√

Sumber : Monografi Desa 2006

Pendidikan Masyarakat

Secara umum tingkat pendidikan masyarakat desa Panglima Raja tergolong rendah lebih disebabkan oleh tidak cu-

kupnya sarana pendidikan yang tersedia, yaitu hanya sampai tingkat Sekolah Dasar (SD) sedangkan untuk tingkat lanjutan tidak tersedia.

Tabel 3. Struktur Pendidikan Penduduk Desa Panglima Raja, Tahun 2006

No	Tingkat Pendidikan	Dusun Panglima Raja (orang)	Dusun Sungai Condong (orang)	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1.	Tamat dan tidak SD	1.431	300	1.731	90,02
2.	Madrasah Ibtid'iah	28	1	29	1,51
3.	SMP	112	4	116	6,03
4.	SMA/SMU	34	4	38	1,98
5.	D1-D3	1	1	2	0,10
6.	Sl	4	2	6	0,31
7.	Pondok Pesantren	-	1	1	0,05
Jumlah		1.610	313	1.923	100,00

Sumber: Monografi Desa 2006

Sarana, Prasarana dan Aksesibilitas

Desa Panglima Raja merupakan desa pemekaran atau desa baru sehingga

sarana dan prasarana kehidupan masyarakat masih kurang, hal ini dapat terlihat pada Tabel.4 berikut:

Tabel 4. Sarana dan Prasarana Desa Panglima Raja, Tahun 2006

No.	Sarana-prasarana	Jumlah (buah)/unit
1.	Kios/Toko/kedai harian	30
2.	Gedung Pemerintah desa	1
3.	Gedung SD	1
4.	Pustu	1
5.	Masjid	1
6.	Mushola	1
7.	Lapangan olah raga	1
8.	Pelantar sebagai jalan	1800 meter
9.	Pompong	312
10.	Speed Boat	4

Sumber: Monografi Desa, 2006

Tabel 5. Orbitrasi, Waktu Tempuh dan Letak Desa/Kelurahan

No.	Orbitrasi & Jarak tempuh	Keterangan
1.	Jarak ke Ibukota Kecamatan	44 km
2.	Jarak ke Ibukota Kabupaten	61 km
3.	Jarak ke Ibukota Propinsi	498 km
4.	Waktu Tempuh ke Ibukota Kecamatan	1,5 km
5.	Waktu tempuh ke Ibukota Kabupaten	2 jam
6.	Waktu tempuh ke Ibukota Popinsi	8 jam

Sumber: Monografi Desa, 2006

Kelembagaan

Pemerintahan Desa

Dalam UU 4/1979 tentang Pemerintahan Desa, disamping Kepala Desa maka kelembagaan formal lain yang mesti ada adalah Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) yang berperan sebagai lembaga pengawas (legistatif). Namun setelah dikeluarkan UU 22/1999 tentang otonomi daerah terjadi perubahan kelembagaan menjadi Badan Perwakilan Desa (BPD) yang berperan sebagai badan permusyawaratan desa yang menjadi mitra sejajar Kepala Desa dalam membangun desa.

Kelembagaan PKK

Kelembagaan PKK merupakan organisa wanita para ibu rumah tangga

yang diketuai oleh istri Kepala Desa, dimana kegiatannya secara rutin dilakukan satu kali dalam sebulan. Bentuk kegiatan masih terbatas pada kegiatan arisan, pengajian dan pembinaan masak-memasak bagi ibu rumah tangga dan remaja putri.

Karang Taruna

Karang taruna merupakan wadah organisasi pemuda di tingkat desa dalam melakukan kegiatan, terutama untuk menyalurkan berbagai bakat dan keahlian generasi muda desa. Kegiatan yang banyak dilakukan oleh pemuda di daerah ini adalah kegiatan olah raga seperti sepak bola dan bola voli serta berbagai kegiatan kesenian.

Majelis Taklim

Kelembagaan ini merupakan kelembagaan informal yang tumbuh dari kalangan ibu-ibu yang khusus melakukan kegiatan keagamaan seperti wirid pengajian dan yasinan. Kegiatan kelembagaan ini cukup mendapat partisipasi dari masyarakat khususnya para ibu rumah tangga. Biasanya kegiatan ini dilakukan sekali seminggu.

Kelompok Nelayan

Di desa Panglima Raja telah terbentuk kelompok nelayan, namun sejauh ini belum banyak berfungsi. Kelompok ini secara umum masih menjadi target berbagai kegiatan, namun dampaknya terhadap kemampuan kelompok belum dapat dilihat.

Potensi Sumberdaya Alam

Sesuai dengan topografi dan letaknya, potensi sumberdaya alam Desa Panglima Raja terdiri dari potensi perikanan (perairan), kehutanan, perkebunan, jasa lingkungan dan potensi sekunder lainnya.

Berdasarkan data monografi desa (2006), potensi sumberdaya alam di desa Panglima Raja dapat digolongkan ke dalam dua kategori yaitu:

1. Potensi flora, didominasi oleh jenis-jenis pohon yang terdapat di ekosistem hutan bakau (mangrove), yaitu seperti *Rhizophora apiculata*, *Bruguiera praxiflora* dan *Avicennia alba*.
2. Potensi fauna didominasi oleh jenis burung dan hewan melata seperti ular, biawak, dan buaya. Disamping itu ada juga jenis mamalia seperti monyet.

Ditinjau dari potensi sumberdaya perairan pesisir, desa Panglima Raja

mempunyai tipologi perairan subur dengan zat hara. Hal ini diindikasikan dengan warna air yang coklat karena muatan partikel zat hara serta tipe substrat yang lunak dan berlumpur. Kondisi ini disebabkan suplai nutrien dari daratan melalui sungai serta hamparan hutan bakau yang cukup luas di pantai Panglima Raja (Dinas Perikanan dan Kelautan Indragiri Hilir, 2004).

Kearifan Lokal dalam Pemanfaatan dan Pelestarian Sumberdaya Pesisir di Desa Panglima Raja

Kearifan masyarakat lokal yang sering diistilahkan secara singkat sebagai kearifan lokal atau *Local Wisdom*, merupakan sesuatu yang diketahui sebagai perilaku sosial masyarakat lokal dalam berinteraksi dan berinterelasi dengan kehidupannya. Perilaku sosial dalam kaitannya dengan lingkungan paling tidak terdiri dua dimensi, yaitu: *pertama*, bagaimana karakteristik dan kualitas lingkungan mempengaruhi perilaku sosial tertentu, dan *kedua*, bagaimana perilaku sosial tertentu mempengaruhi karakteristik dan kualitas lingkungan (Usman, 1996).

Dapat dijelaskan bahwa dimensi yang pertama selalunya terjadi pada masyarakat tradisional, dimana terdapat ketergantungan yang tinggi terhadap perubahan lingkungan alam. Dimensi yang kedua biasanya terjadi pada masyarakat modern, karena penguasaan pengetahuan dan teknologi yang tinggi telah memunculkan kemampuan dan keahlian bahwa manusia mampu mengatur dan mengendalikan kondisi lingkungan.

Masyarakat di Kawasan Desa Panglima Raja berada pada kondisi peralihan, cara-cara tradisional yang mereka jalankan harus berhadapan dengan cara-

cara modern yang mulai mempengaruhi sistem kehidupan mereka. Disisi lain paradigma pembangunan perikanan dan kelautan yang mulai bergeser pada pembangunan komunikatif yang berbasis masyarakat atau *co-management*,

memberikan penekanan yang besar pula pada sosial budaya masyarakat. Paradigma pembangunan seperti ini selalu mengedepankan nilai-nilai yang mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat.

Tabel 6. Kearifan Lokal Masyarakat di Kawasan Desa Panglima Raja dalam Pemanfaatan dan Pelestarian Sumberdaya Pesisir

Tujuan Kegiatan	No	Nilai dan Norma Kearifan Lokal yang berlaku
Pemanfaatan Sumberdaya Pesisir	1.	Penentuan waktu, cuaca dan musim dalam melakukan penangkapan ikan
	2.	Mempertahankan penggunaan alat tangkap tradisional dalam menangkap ikan dan kerang
	3.	Menentukan kawasan boleh menebang bakau
Pelestarian Sumberdaya Pesisir	1.	Upacara penghormatan terhadap laut.
	2.	Komitmen tidak menangkap dan membunuh lumba-lumba
	3.	Menganggap wilayah tertentu sebagai wilayah keramat
	4.	Komitmen untuk tidak membuang sampah/rimah ke laut
	5.	Komitmen tidak menggunakan songko bermesin dalam mengumpulkan kerang
	6.	Menjaga hutan bakau yang berada di kawasan pinggir pantai

Dari data pada Tabel 6 dapat dijelaskan bahwa nilai kearifan lokal yang terkandung pada masing-masing kegiatan pemanfaatan dan pelestarian sumberdaya pesisir tersebut adalah sebagai berikut. *Pertama* tentang penentuan waktu, cuaca dan musim dalam melakukan penangkapan ikan sangat memberikan pengaruh terhadap keberhasilan penangkapan, jika kegiatan penangkapan dilakukan pada waktu, cuaca dan musim yang sesuai maka kegiatan penangkapan akan mendapatkan hasil yang baik. Begitu juga sebaliknya. Kemudian pada musim angin utara misalnya, masyarakat tidak melakukan penangkapan karena gelombang dan angin laut kurang bersahabat, pada hal waktu-waktu seperti ini berbagai jenis ikan melakukan pemijahan. Sehingga kegiatan tidak menangkap ikan pada musim utara dapat memberikan kesempatan bagi keberlangsungan berbagai jenis spesies ikan untuk berkembang. Ke-

giatan ini pada saat sekarang masih berlangsung dalam masyarakat Desa Panglima Raja.

Kedua tentang upaya mempertahankan penggunaan alat tangkap tradisional yang merupakan salah satu cara yang baik untuk menjaga pelestarian berbagai sumberdaya perikanan. Penggunaan alat tangkap tradisional diyakini lebih ramah lingkungan, efektif dan hasil tangkapannya lebih selektif sehingga dapat mempertahankan kondisi potensi sumberdaya perikanan yang ada, seperti yang dijelaskan Dahuri (2000) pada bagian sebelumnya.

Ketiga tentang penebangan bakau yang hanya boleh dilakukan pada kawasan tertentu yang jauh dari pinggiran pantai. Jika penebangan bakau dilakukan di sekitar kawasan pantai maka tempat tinggal berbagai jenis sumberdaya perikanan menjadi rusak. Seperti di-

jelaskan Dahuri (1996), hutan bakau memiliki arti penting bagi ekosistem perairan sekitarnya karena daun bakau yang gugur diuraikan oleh mikroorganisme menjadi partikel detritus yang menjadi sumber makanan bagi bermacam hewan laut.

Keempat tentang upacara penghormatan terhadap laut (*semah laut*) yang merupakan kegiatan masyarakat peninggalan nenek moyang. Kegiatan ini memiliki nilai kearifan terhadap pelestarian sumberdaya perikanan, karena setelah melakukan upacara *semah laut* masyarakat tidak boleh melaut. Pada masa-masa inilah berbagai jenis ikan yang sudah matang gonad diberi kesempatan melakukan pemijahan, dan beberapa hari kemudian telur menetas menjadi larva. Ketenangan wilayah perairan dari kegiatan penangkapan ikan diperlukan agar larva yang sangat rentan terhadap perubahan lingkungan dapat tumbuh menjadi benih yang kuat. Hanya saja, upacara *semah laut* ini saat sekarang tidak lagi dilakukan secara bersama-sama, hanya dilakukan secara individu dengan tujuan yang berbau mistis atau tahayul. Sehingga nilai kearifannya sudah mengalami pemudaran.

Kelima tentang anggapan bahwa wilayah tertentu sebagai wilayah keramat makna yang dapat diambil bagi pelestarian sumberdaya pesisir adalah menciptakan susana tenang dikawasan perairan sehingga memudahkan ikan-ikan melangsungkan pemijahan, kemudian larva-larva ikan tersebut mudah berkembang menjadi benih. Inilah nilai pelestarian sumberdaya pesisir yang terkandung terhadap adanya pantangan dan larangan tersebut.

Keenam tentang komitmen tidak menangkap dan membunuh lumba-lumba. Diketahui bahwa jika disuatu kawa-

san perairan terdapat lumba-lumba dan ikan berukuran besar di kawasan itu banyak terdapat ikan-ikan yang berukuran lebih kecil, karena merupakan sumber makanan lumba-lumba dan ikan-ikan besar. Nilai kearifannya adalah lumba-lumba merupakan petunjuk bahwa diperairan itu masih banyak terdapat ikan.

Ketujuh tentang tabu dalam kegiatan makan yang bertaburan dan membuang rimah/sampah, atau tidak sopan di laut. Makna yang diambil dari pantang larang ini adalah agar laut tidak tercemar, sehingga berbagai aktifitas kehidupan hewan laut tidak terganggu. Sampah berserakan di laut akan mengganggu kualitas perairan, menghalangi intensitas cahaya matahari yang masuk, dan pada akhirnya menyebabkan kerusakan ekosistem perairan.

Kedelapan tentang komitmen untuk tidak menggunakan songko bermesin dalam mengumpulkan kerang. Hal ini bertujuan untuk memelihara kelangsungan kehidupan berbagai jenis kerang yang dimanfaatkan masyarakat. Walau hasil tangkapan alat ini lebih banyak tetapi dapat merusak sistem kehidupan di wilayah pesisir. Masyarakat hanya membolehkan penggunaan alat tangkap tradisional yang disebut *tongkah*.

Kesembilan tentang keharusan menjaga hutan bakau yang berada di kawasan pinggir pantai, karena perairan di sekitar bakau ini banyak terdapat udang, ikan dan berbagai jenis kerang. Oleh sebab itu masyarakat desa memandang tabu melakukan penebangan pohon bakau (*mangrove*) yang berada di tepi pantai.

Dari hasil identifikasi kearifan lokal masyarakat di desa Panglima Raja tersebut, kegiatan pemanfaatan dan pelestarian sumberdaya pesisir yang mengandung nilai kearifan masih berlangsung dalam aktivitas mereka. Masih

eksistensinya beberapa kearifan lokal tersebut dikarenakan pemahaman dan kepentingan masyarakat tentang nilai-nilai kearifan yang dikandungnya.

Bapak MN menyatakan "*kegiatan dan semua bentuk yang telah diwariskan tetua kami, sampai sekarang masih bertahan pada sebagian kami, kerne apa yang diwariskan tersebut banyak mengandung hikmah dan kebaikan bagi kami, macam tak boleh menangkap ikan pada kawasan tertentu. kate orang sekolah, rupenye tempat-tempat yang tak boleh tu tempat ikan betelo dan berkembang biak, kalau dilanggar bise-bise ikan tak ade lagi nanti*" (semua apa yang diwariskan oleh pendahulu kami sebagian masih bertahan, karena diyakini hal tersebut mengandung hikmah dan kebaikan, seperti larangan menangkap ikan di wilayah tertentu, kata orang yang berpendidikan, tempat seperti itu merupakan tempat ikan bertelur dan berkembang biak, jika dilanggar, dapat menyebabkan kepunahan terhadap keberadaan sumberdaya perikanan).

Dari pernyataan tersebut dapat dijelaskan bahwa masyarakat meyakini segala yang telah diwariskan oleh para pendahulu mereka mengandung banyak hikmah dan pelajaran dalam menjalankan berbagai aktifitas mereka. Keraf (2002) menyatakan bahwa kearifan tradisional adalah semua bentuk pengetahuan, keyakinan, pemahaman atau wawasan serta adat kebiasaan atau etika yang menuntun perilaku manusia dalam kehidupan di dalam komunitas ekologis. Jadi, kearifan tradisional ini bukan hanya menyangkut pengetahuan dan pemahaman masyarakat adat tentang manusia dan bagaimana relasi yang baik di antara manusia, melainkan juga menyangkut pengetahuan, pemahaman dan adat kebiasaan tentang manusia, alam dan bagaimana relasi di antara semua

penghuni komunitas ekologis ini harus dibangun. Seluruh kearifan tradisional ini dihayati, dipraktikkan, diajarkan dan diwariskan dari satu generasi ke generasi lain yang sekaligus membentuk pola perilaku manusia sehari-hari, baik terhadap sesama manusia maupun terhadap alam dan yang Gaib.

Ini menunjukkan bahwa, *pertama*, kearifan tradisional adalah milik komunitas. Demikian pula, yang dikenal sebagai pengetahuan tentang manusia, alam dan relasi dalam alam juga milik komunitas.

Kedua, kearifan tradisional, yang juga berarti pengetahuan tradisional, lebih bersifat praktis. Pengetahuan dan kearifan masyarakat adat adalah pengetahuan bagaimana hidup secara baik dalam komunitas ekologis, sehingga menyangkut bagaimana berhubungan secara baik dengan semua isi alam.

Ketiga, kearifan tradisional bersifat holistik, karena menyangkut pengetahuan dan pemahaman tentang seluruh kehidupan dengan segala relasinya di alam semesta. Alam adalah jaring kehidupan yang lebih luas dari sekadar jumlah keseluruhan bagian yang terpisah satu sama lain.

Keempat, berdasarkan kearifan tradisional dengan ciri seperti itu, masyarakat adat juga memahami semua aktivitasnya sebagai aktivitas moral. Kegiatan bertani, berburu dan menangkap ikan bukanlah sekadar aktivitas ilmiah berupa penerapan pengetahuan ilmiah tentang dan sesuai dengan alam, yang dituntut oleh prinsip-prinsip dan pemahaman ilmiah yang rasional. Aktivitas tersebut adalah aktivitas moral bersumber dari kearifan tradisional.

Kelima, berbeda dengan ilmu pengetahuan Barat yang mengklaim dirinya sebagai universal, kearifan tradisio-

nal bersifat lokal, karena terkait dengan tempat yang partikular dan konkret. Tetapi, karena manusia dan alam bersifat universal, kearifan dan pengetahuan tradisional dengan tidak direkayasapun menjadi universal pada dirinya sendiri.

Sumber Kearifan Lokal

Sejak awalnya, telah diyakini bahwa nenek moyang masyarakat Desa Panglima Raja memiliki landasan kepercayaan yang bersumber dari adat secara turun temurun dari pendahulu nenek moyang dengan filosofi *Alam Terkembang Jadi Guru dengan Belajar Kepada Laut*, jika dilihat filosofi adatnya hampir mirip dengan filosofi adat Suku Minang. Hal ini dikarenakan masyarakat Suku Duano mengambil filosofi ajarannya berdasarkan ajaran Islam dan ajaran Hindu mengandung kepercayaan yang berbau mistik, seperti halnya juga Suku Minang.

Prinsip-prinsip Kearifan Lokal

Laut merupakan bagian utama dalam kehidupan masyarakat Desa Panglima Raja karena merupakan tempat mencari kehidupan. Hal ini adalah pemahaman terhadap unsur alam yang sangat kuat di kalangan masyarakat Desa Panglima Raja, yang tergambar dalam pernyataan bahwa laut adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan mereka.

Laut merupakan bagian dari lingkungan dapat mengambil manfaat dari manusia dengan kelebihan yang dimiliki. Manusia pun dapat mengambil manfaat dari lingkungan sekedar untuk memenuhi kebutuhan yang wajar, dan menjauhi sikap berlebihan. Pepatah mengatakan: *"sewaktu masih banyak jangan lobo, ingat sebelum habis, jimat-jimat la supaya tak sesal di kedian hari"* (sewaktu masih banyak jangan terlalu tamak atau boros, ingat sebelum semua

habis, berhematlah supaya tak menyesal dikemudian hari).

Kearifan lokal masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya pesisir di Kawasan Desa Panglima Raja sebenarnya telah berlandaskan pemahaman prinsip ekologi dan ekosistem. Kearifan tersebut dikemas dalam bahasa yang sederhana, berupa Filosofi yang memuat substansi nilai dan berperilaku. Sumber utama terbangunnya kearifan lokal tersebut adalah ajaran Agama Islam pengaruh Kerajaan Indragiri, adat dan filosofi pentingnya belajar dan mempelajari alam dan ajaran Agama Hindu dengan kepercayaan terhadap hal-hal mistik.

Peran Kelembagaan Lokal Terhadap Kearifan Lokal

Desa Panglima Raja saat ini tidak memiliki lembaga adat. Dengan demikian peran lembaga adat terhadap pelaksanaan kearifan nilai-nilai tradisional dalam pemanfaatan dan pelestarian sumberdaya pesisir tidak ada lagi.

Upaya melegalisasi nilai-nilai tradisional dalam pemanfaatan dan pelestarian sumberdaya pesisir telah dilakukan oleh lembaga pemerintahan desa melalui Peraturan Desa Panglima Raja 01/PERDES/PR/X/2005 tentang Partisipasi Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Lestari. Secara normatif, peraturan ini dibuat berdasarkan pada nilai, norma dan prinsip yang dianut sejak turun temurun oleh masyarakat dalam pemanfaatan dan pelestarian sumberdaya pesisir. Peraturan ini sekaligus menggambarkan adanya kemauan dan kegiatan pemerintahan desa untuk memunculkan kembali fungsi kearifan lokal dalam pelestarian sumberdaya pesisir. Kegiatan ini telah difasilitasi oleh program *Small Scale Natural Resources Management* (SNRM), yang lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 8.

Tabel 8. Peran lembaga pemerintahan desa terhadap nilai dan norma kearifan lokal dalam pemanfaatan dan pelestarian sumberdaya pesisir

Peran kelembagaan lokal	No	Nilai dan norma kearifan lokal yang berlaku
Peran lembaga pemerintahan desa	1.	Pelarangan menggunakan putas dan pukat
	2.	Pelarangan menggunakan songko mesin
	3.	Menentukan wilayah konservasi bakau
	4.	Pelarangan menebang bakau
	5.	Membuat Peraturan Desa 01/PERDES/PR/X/2005 tentang Partisipasi Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Lestari di Kawasan Desa Panglima Raja

Sumber : Hasil analisis data primer dan sekunder

Seharusnya peraturan desa (perdes) tentang legalitas pengelolaan wilayah pesisir memiliki kekuatan untuk dijalankan oleh masyarakat setempat. Akan tetapi dalam prakteknya perdes itu sulit untuk dijalankan karena pengakuan dan legalitasnya spesifik hanya bagi masyarakat Desa Panglima Raja. Pihak luar, dan bahkan termasuk pemerintah kabupaten, belum mengakuinya sehingga perdes tersebut tidak kuat dan belum berfungsi. Hasil wawancara mendalam dengan Bapak FN seorang pimpinan fasilitator Kabupaten, adalah bahwa: "Lahirnya peraturan desa karena merupakan syarat dalam program SNRM. Peraturan ini dibuat seyogyanya membantu masyarakat mengadopsi kembali nilai-nilai, norma dan prinsip yang telah mereka jalankan selama ini, dengan harapan masyarakat mampu mengelola wilayah sendiri. Akan tetapi dalam prakteknya peraturan desa ini sulit untuk dijalankan dikarenakan legalitas peraturan hanya berada di tingkat desa setempat, sedangkan pemerintah kabupaten belum melegalisasi perdes tersebut untuk disahkan dengan alasan bahwa Desa Panglima Raja belum memerlukan perdes. Sehingga perdes yang telah disusun hanya sebuah syarat untuk berjalannya suatu program."

Jika dilihat pada isi perdes yang mencoba mengakomodir kearifan lokal

masyarakat tersebut adalah Pasal 11: Aturan adat atau tradisi yang lahir dalam masyarakat desa yang bermanfaat bagi pengelolaan sumberdaya desa lestari perlu ditegakkan. Pasal 12: Dalam rangka pengelolaan sumber daya pesisir dilarang melakukan kegiatan yang dapat merusak lingkungan seperti membuka lahan dengan cara membakar, menebang hutan secara liar, membuang sampah dan kotoran di sungai, menggunakan alat tangkap yang merusak lingkungan, dan membuka tambak kurang dari 200 m dari garis pantai.

Kemudian Pasal 20 yang berisikan aturan tentang sanksi pelanggaran perdes menyatakan: Barang siapa dengan sengaja atau karena kelalaian melanggar peraturan desa ini, dikenakan sanksi berupa 1) Peringatan/teguran lisan 2) Peringatan/teguran tertulis 3) denda, yang akan diatur dalam peraturan selanjutnya.

Jika diperhatikan isi perdes yang telah disusun tersebut, dapat dijelaskan bahwa peran lembaga pemerintahan desa masih belum berperan secara penuh untuk melaksanakan nilai, norma dan prinsip yang dianut masyarakat dalam pemanfaatan dan pelestarian sumberdaya pesisir sebagai nilai kearifan masyarakat lokal untuk menjadi sesuatu aturan yang diakui legalitasnya.

Model Pengelolaan Sumberdaya Pesisir di Desa Panglima Raja

Kearifan lokal masyarakat yang memiliki kesamaan karakteristik wilayah dan sumberdaya dengan wilayah kawasan Desa Panglima Raja adalah lembaga adat pengelolaan sumberdaya laut di Indonesia Timur, yang mengatur hak pemanfaatan sumberdaya laut oleh masyarakat setempat. Model pengelolaan seperti ini dikenal dengan Hak Ulayat Laut (HUL) atau *sea tenure*.

Hak ulayat laut merupakan seperangkat aturan atau praktik pengelolaan wilayah laut dan sumberdaya yang terkandung didalamnya, yang menyangkut siapa yang memiliki hak atas suatu wilayah, jenis sumberdaya yang boleh ditangkap dan teknik mengeksploitasi sumberdaya yang diperkenankan. HUL mengacu pada seperangkat hak dan kewajiban timbal balik yang muncul dalam institusi kepemilikan bersama.

Sistem pengelolaan sumberdaya laut secara adat dijalankan hampir menyebar diseluruh Indonesia, tetapi sebagai akibat transformasi struktural dari masyarakat tradisional menuju ke masyarakat industri (modernisasi) praktik HUL masih tetap dipegang dan dijalankan yang sebagian besar berada di Indonesia bagian timur.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari pembahasan dan analisis hasil penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka kesimpulan dan saran dinyatakan sebagai berikut:

1. Kearifan lokal masyarakat Desa Panglima Raja tentang pemanfaatan sumberdaya pesisir yang masih ada berupa: (i) menentukan waktu menangkap ikan berdasarkan cuaca dan musim; (ii) mengembangkan alat

tangkap ikan dan alat pengumpul kerang, dan; (iii) menentukan kawasan penebangan bakau. Sedangkan kearifan lokal tentang pelestarian sumberdaya pesisir berupa: (i) ritualisasi (pengupacaraan) penghormatan terhadap laut; (ii) adanya komitmen untuk tidak menangkap dan membunuh lumba-lumba, membuang sampah ke laut, menggunakan songko bermesin dalam menangkap ikan dan mengumpulkan kerang, serta; (iii) menjaga hutan bakau di sekitar pinggir pantai. Sumber utama kearifan lokal tersebut adalah kepercayaan atau adat serta ajaran Islam dan Hindu. Kearifan lokal tersebut berlandaskan pemahaman prinsip ekologi dan ekosistem yang dikemas dalam bahasa yang sederhana, berupa filosofi yang memuat substansi nilai dan berperilaku terhadap alam/lingkungan.

2. Peran lembaga adat terhadap kearifan lokal mengalami kemunduran sejak zaman kerajaan. Pemerintahan nasional meneruskan saja sistem dan cara-cara yang sudah berlaku. Lembaga pemerintahan desa dalam hal ini belum berperan maksimal dalam mengakomodir nilai-nilai kearifan lokal secara partisipatif.

Saran

Agar upaya pemanfaatan dan pelestarian sumberdaya pesisir dapat dijalankan secara efektif dan optimal oleh masyarakat, maka perlu:

1. Keterlibatan kelembagaan lokal khususnya lembaga adat dan pemerintahan desa.
2. Memunculkan kembali peran lembaga adat dalam kearifan lokal.
3. Peran lembaga pemerintahan desa diharapkan mampu membuat perdes yang mangakomodir nilai, norma dan prinsip yang dianut masyarakat lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- BP3SP, Faperika Unri. 2004. Profil Daerah Penerima Program SNRM Kabupaten Indragiri Hilir. (tidak diterbitkan)
- Dahuri, R., J. Rais, S. P. Ginting dan M. J. Sitepu. 1996. Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Lautan Secara Terpadu. P.T. Pradnya Paramita. Jakarta.
- Dahuri, R. 2000. Pendayagunaan Sumberdaya Kelautan Untuk Kesejahteraan Rakyat. Kumpulan Pemikiran. Lembaga Informasi dan Studi Pembangunan Indonesia. Jakarta. 145 hal.
- Dinas Perikanan dan Kelautan Inhil, 2004. Kajian Akademik Pengelolaan Wilayah Pesisir Kabupaten Indragiri Hilir.
- Keraf, A. Sony. 2002. Etika Lingkungan. Penerbit Buku Kompas. Jakarta.
- Kusumastanto, T, 2003. Ocean Policy dalam Membangun Negeri Bahari di Era Otonomi Daerah. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Maleong, L.J. 2000. Metodologi Penelitian Kualitatif Remaja Rosdakarya. Bandung.
- PemKab Inhil, 2005. Sejarah Indragiri Hilir. <http://www.inhil.go.id>
- Prijono, S.N. 2000a. Laporan Pendukung No 1: Sejarah dan Latar Belakang Proyek.
- Prijono, S.N. 2000b. Memanfaatkan Satwa dan Puspa Secara Berkelanjutan. Warta Kehati. Oktober-November 14-15.
- Rusliadi., 2005. Analisis Keberlanjutan Kelembagaan Konservasi Program Rehabilitasi dan Pengelolaan Terumbu Karang "Coral Reef Rehabilitation And Management Program" (COREMAP) di Desa Temiang Kecamatan Senayang Kabupaten Lingga Propinsi Kepulauan Riau. Tesis Pascasarjana Universitas Andalas. Padang.
- Sugiono. 2000. Metode Penelitian Administrasi. Alfabeta. Bandung.
- Usman, S.1996. Sosiologi Lingkungan. Pembahasan Tentang Lingkungan dan Perilaku Sosial. Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. (tidak diterbitkan)